

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL TURKI DAN ISRAEL

Selayaknya sebuah hubungan bilateral antara dua buah negara berdaulat, hubungan Turki dan Israel juga memiliki sejarah awal mula terbentuknya hubungan dan dinamika-dinamika yang mewarnai perjalanan hubungan bilateral kedua negara. Hubungan bilateral kedua negara dimulai ketika Turki mengambil langkah berani dengan mengakui kedaulatan Israel pada tahun 1949, kemudian terus berlanjut hingga saat ini meskipun tetap diwarnai banyak masalah terutama mengenai isu Palestina. Pada BAB II ini penulis akan mengulas tentang harmonisasi hubungan Turki dan Israel, konflik yang mewarnai, serta normalisasi hubungan pada tahun 2016.

A. Harmonisasi Hubungan Bilateral Turki dan Israel

1. Pengakuan Kedaulatan Israel oleh Turki

Negara Israel resmi diproklamkan pada tahun 1948, hanya berselang setahun setelah itu Turki memberikan pengakuan terhadap kedaulatan negara Israel pada tahun 1949 dan merupakan salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan. Turki mengakui kemerdekaan Israel di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949 (Santosa, 2017). Turki juga merupakan negara pertama dengan mayoritas penduduk Muslim yang mengakui kedaulatan Israel di kawasan Timur Tengah dan juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap inilah yang membuat Negara Timur Tengah kecewa dan marah terhadap Turki.

Turki kala itu yang masih dipimpin oleh rezim CHP, masih terus berupaya untuk mendekati diri dengan Barat. Sehingga pengakuan

terhadap kedaulatan Negara Israel akan semakin meyakinkan Barat untuk bekerjasama dengan Turki, karena pada saat itu pendukung berdirinya Negara Israel adalah negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dengan pengakuan terhadap kedaulatan Israel pada tahun 1949, akhirnya Turki juga diterima menjadi anggota dari organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 1952 (Alfian, 2015, hal. 46).

Sejarah berdirinya negara Israel sendiri dimulai sejak adanya konsep tanah Israel yang telah dipercaya sejak zaman terdahulu. Hingga akhirnya, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang saat ini telah berganti menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui adanya pembagian wilayah Palestina pasca Perang Dunia II menjadi dua wilayah yaitu wilayah Yahudi dan wilayah Arab. Namun sebenarnya persetujuan ini ditolak oleh bangsa Palestina dan bangsa Arab lainnya.

Dampak dari adanya persetujuan tersebut, sejarah Negara Israel baru saja dimulai dengan proklamasi kemerdekaan negaranya pada tanggal 14 Mei 1948 dengan pusat pemerintahan di Yerusalem. Hal tersebutlah yang menjadi memicu peperangan antara Israel dengan bangsa Arab lain yang menolak sistem pembagian wilayah ini dan berakhir dengan kemenangan Israel. Akibat peperangan tersebut, Negara Israel pun berhasil memperluas wilayah teritorinya hingga melebihi batas yang telah ditentukan oleh PBB pada saat rencana pembagian wilayah Palestina.

Setelah itu, Negara Israel terus melakukan peperangan dengan bangsa Arab hingga pada akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan Yordania dan juga Mesir pada tahun 1967, sedangkan dengan Palestina

belum juga mencapai kesepakatan hingga saat ini. Tentu hal tersebut mendapat pertentangan dan kritikan dari berbagai negara di dunia namun tidak pernah bisa tersepakati atau mendapat titik solusi yang mungkin telah ditakdirkan dalam sejarah Israel (Hasan, 2017).

2. Kerjasama-Kerjasama Turki dan Israel

Untuk menindaklanjuti hubungan pasca pengakuan kedaulatan Israel oleh Turki, kemudian Turki dan Israel menandatangani sebuah Pakta yang bertujuan untuk mengikat perjanjian kerjasama kedua negara yakni Pakta Periferal pada tahun 1958, Pakta ini berisi antara lain yaitu kedua negara sepakat untuk saling bertukar informasi intelijen dan kampanye kehumasan ke dalam komunitas dan rakyat masing-masing. Kedua negara terletak di kawasan yang sama, yaitu kawasan Timur Tengah sehingga akan sangat menguntungkan kedua negara jika melakukan kerjasama.

Gambar 1.2 Peta Kawasan Timur Tengah



Sumber : Britannica (<https://www.britannica.com/story/are-the-middle-east-and-the-near-east-the-same-thing>)

Selain berbagai bentuk kerjasama tersebut, kedua negara juga memiliki perjanjian kerjasama bilateral di berbagai bidang lainnya, antara lain kerjasama kepolisian, pertukaran kebudayaan, pembangunan pertanian, perdagangan dan ilmu pengetahuan. Hal lain yang menjadi istimewa dari hubungan kedua negara yakni warga negara Israel atau pemegang paspor Israel tidak perlu visa untuk masuk ke Turki, mereka dapat masuk ke Turki kapan saja mereka mau, seperti masuk ke negara sendiri dan tanpa visa (Santosa, 2017).

Kedua negara telah sepakat untuk membentuk komisi-komisi bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang penanggulangan terorisme dan pengumpulan data intelijen mengenai Suriah, Iran dan Irak. Hal tersebutlah yang menyebabkan pada saat Perang Arab-Israel pada tahun 1967 Turki terlihat mengecam Israel, namun sekaligus menolak klausul yang menyatakan Israel sebagai negara agresor. Perang enam hari pada tahun 1967 juga menyebabkan jatuhnya Yerusalem Timur termasuk kawasan Masjid Al-Aqsa ke tangan Israel hingga saat ini (TRIBUN, 2017).

Hubungan kerjasama antara Turki dan Israel di bidang Pertahanan dan Keamanan telah lebih dulu diintensifkan sejak tahun 1993. Kemudian data Institut Turki menyebutkan bahwa di bidang Pertahanan dan Keamanan, kedua negara juga memiliki perjanjian *Security and Confidentiality Pact* (Perjanjian Keamanan dan Kerahasiaan), ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1994, dengan kesepakatan tersebut kedua negara sepakat untuk saling bertukar informasi dan dipastikan

jaminan atas kerahasiaannya bagi pihak ketiga mana pun, latihan militer bersama serta produksi dan perdagangan senjata (Dhani, 2016).

Hubungan antara Turki dan Israel memang tak selalu harmonis, tetapi kedua negara tersebut saling sigap ketika diantara kedua negara tersebut terkena masalah. Misalnya pada saat bencana gempa Izmit pada 1999 terjadi, pasukan khusus Israel dan paramedik Israel langsung diterjunkan oleh pemerintah Israel untuk memberikan bantuan terhadap pemerintah Turki. Setidaknya terdapat kurang lebih 17.000 orang yang terselamatkan atas bantuan Israel yang diberikan selama berminggu-minggu setelah peristiwa tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi peristiwa kebakaran hutan di gunung Carmel Israel pada tahun 2010, Turki adalah negara pertama yang memberikan bantuan kepada Israel untuk membantu memadamkan api yang mengakibatkan kebakaran tersebut (Dhani, 2016).

B. Konflik Hubungan Bilateral Turki dan Israel

1. Isu Palestina sebagai ganjalan hubungan Turki dan Israel

Setelah kemenangan Partai AKP pada 2002, pihak Israel merasakan kecemasan yang luar biasa, karena simpati dari pemimpin partai AKP terhadap masalah Palestina akan menyebabkan persoalan Palestina menjadi lebih sulit dan rumit. Israel khawatir kerjasama antara Turki dan Israel dalam bidang militer dan ekonomi yang sudah terjalin lama akan terganggu akibat isu Palestina tersebut. Hal tersebut terbukti, ketika Erdogan mengambil langkah yang mengejutkan Israel karena melontarkan kritikan tajam atas terjadinya pembunuhan terhadap pendiri Hamas, yakni Syaikh Ahmad

Yasin oleh militer Israel, Erdogan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah terorisme.

Pada tahun 2005, Erdogan melakukan kunjungan mendadak ke Israel dan kemudian ke Palestina. Dalam pertemuannya dengan perdana menteri Israel Ariel Sharon, Erdogan mengajukan keinginan Turki untuk menjadi mediator antara Palestina dan Israel, namun Ariel Sharon tidak memberikan respon yang positif dan tidak menanggapi peran semacam ini. Kecemasan Israel semakin meningkat karena perkembangan yang sangat pesat dari kebijakan-kebijakan politik luar negeri Turki yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Erdogan juga mengakui eksistensi dari Hamas dan menolak menyebut kelompok perjuangan tersebut sebagai jaringan teroris. Erdogan mengakui telah menerima pemimpin Hamas berulang kali sejak tanggal 16 Februari 2005, ketika menyambut kedatangan kepala biro politik Hamas Khalid Miys'al di Ankara.

Israel menyadari negaranya menjadi yang paling dirugikan akibat berpalingnya Turki ke kawasan Timur Tengah, tepatnya terhadap dunia Arab serta berbagai persoalan yang terus berkembang didalamnya, yang menurut Israel menghancurkan kepentingan-kepentingan strategisnya. Sikap terbuka dan tegas dari Erdogan yang menolak berbagai macam kebijakan Israel terhadap Palestina dan Pembantaian terhadap penduduk Palestina di Jalur Gaza, dibuktikan dengan langkah berani Erdogan dalam konferensi di Davos tahun 2009 yang membahas tentang ekonomi (Dzakirin, 2012, hal. 203). Hubungan Turki dan Israel semakin memanas, kemudian Turki menolak Israel dalam latihan militer yang bertajuk Elang Anatoli

pada tahun 2009. Latihan ini merupakan gabungan dari NATO dan dihadiri para militer negara-negara tetangga (Taghian, 2012, hal. 456)

2. Pembekuan Hubungan Akibat Insident Mavi Marmara tahun 2010

Pada hari tanggal 30 Mei 2010 dengan dilepas ribuan warga Istanbul, Kapal Mavi Marmara meninggalkan pelabuhan menuju Antalia. Sekitar 700 relawan berangkat dengan bus ke Antalia pada malam harinya. Para relawan itu pun harus bermalam tiga hari dua malam di Antalia. Di dalam kapal tersebut terdapat 400 lebih penumpang laki-laki dan sisanya adalah perempuan serta beberapa anak di bawah umur, bahkan ada anak laki-laki yang baru berusia satu tahun, putra dari seorang aktivis Turki.

Perjalanan Mavi Marmara awalnya tampak tenang dan tanpa hambatan, didalam kapal penumpang muslim tampak menjalankan shalat berjamaah. Dalam perjalanan itu juga para relawan saling berbincang-bincang santai dan ngopi, serta adang mereka juga membahas langkah-langkah serius yang harus dilakukan. Pada hari kedua di dalam kapal tersebut mulai berkembang informasi dari relawan negara-negara Eropa yang mengemukakan bahwa Israel tak akan pernah buka blokade. Israel disebutkan akan melakukan beragam cara untuk mencegah kapal masuk ke perairan Israel.

Pada Minggu 31 Mei 2010, ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, suasana mulai gaduh karena kapten kapal dan juga para penumpang dengan mata telanjang melihat lampu kapal dari kejauhan menyorot terang ke kapal Mavi Marmara. Ada empat kapal perang tentara Israel terus mendekat ke kapal Mavi Marmara. Ketika itu, Mavi Marmara memang

tidak sendiri tetapi terdapat juga lima kapal lainnya yang membawa misi kemanusiaan. Namun posisi kapal Mavi memang paling depan, sedangkan lima kapal lain ada di belakangnya.

Awalnya para aktivis dan penumpang Kapal Mavi menyangka kapal-kapal Israel itu hanya menggertak dan menakut-nakuti saja. Namun para aktivis itu juga bersiap-siap, pelampung mereka kenakan karena mereka khawatir jika pasukan Israel tiba-tiba menyerang. Perasaan mereka terus berkecamuk karena kapal-kapal perang Israel tersebut semakin mendekat dan memepet kapal Mavi Marmara. Para penumpang pun mulai sibuk mencari kayu dan besi-besi untuk senjata, bahkan ada juga yang membawa ketapel.

Didalam kapal tersebut juga terdapat 20 jurnalis dari berbagai TV dan media cetak manca negara, seperti Aljazeera, Kutz TV Lebanon, Press TV Londo, Harbour TV Turkir. Di dalam kapal Mavi, para aktivis dan penumpang mulai memukul-mukulkan kayu dan besi ke badan kapal, bunyinya seperti kentongan ronda saat ada maling serta disambut dengan teraikan *Allahu Akbar* juga terdengar bersahut-sahutan. Insiden tersebut menyebabkan tewasnya 9 aktivis berkewarganegaraan Turki yang menyebabkan Erdogan murka terhadap Israel (TEMPO, 2010).

Israel juga menekankan bahwa tindakan tersebut telah sesuai dengan hukum internasional. Israel berkilah, penumpang-penumpang kapal tersebutlah yang melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap pasukan Israel. Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak armada kapal Mavi Marmara, mereka menyatakan bahwa pasukan Israel mulai melepaskan

tembakkan begitu saja ketika mereka masuk ke dalam kapal Mavi Marmara yang kemudian berujung pada tewasnya 9 aktivis berkewarganegaraan Turki (KOMPAS, 2010).

Hubungan bilateral Turki dan Israel terperosok ke tingkat paling rendah sejak kedua negara tersebut mencapai kemitraan strategis pada 1993 akibat insiden tersebut. Turki memanggil pulang duta besarnya dari Tel Aviv dan membekukan hubungan bilateral kedua negara pada tahun 2010, serta membatalkan tiga rencana latihan militer bersama antara Turki dan Israel. Turki juga dua kali menolak permohonan pesawat militer Israel menggunakan wilayah udaranya (KOMPAS, 2010).

Israel menjadi sorotan dunia setelah serangan mematikan terhadap armada kapal Mavi Marmara tersebut. Bahkan laporan yang dikeluarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 22 September 2011 menyebutkan bahwa terdapat bukti yang jelas untuk mendukung penuntutan Turki terhadap Israel karena pembunuhan dan penyiksaan yang disengaja dalam serangan yang menewaskan sembilan aktivis Turki tersebut. Namun Israel menolak laporan tersebut dengan menyebutnya bias dan mendukung satu pihak saja.

Menteri Luar Negeri Turki Ahmed Davutoglu sempat mengatakan bahwa, Ia ingin melihat lembaran baru setelah sekian tahun memiliki hubungan sulit dengan Israel. Namun, Israel harus meminta maaf terlebih dahulu atas serangan terhadap kapal Mavi Marmara. Israel sekali lagi menolak tuntutan Turki supaya minta maaf karena telah menyerang Kapal Mavi Marmara. Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman malah balik

menyerang dengan mengatakan bahwa seharusnya Turki-lah yang harus minta maaf kepada Israel karena telah mendukung aksi teror (VOA INDONESIA, 2010).

C. Pemulihan Hubungan Bilateral Turki dan Israel Tahun 2016

1. Upaya Pemulihan Hubungan

Dalam hubungan internasional, secara umum seperti yang diketahui bersama bahwa suatu negara tidak dapat memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri tanpa ada bantuan negara lain. Hal tersebut berlaku juga terhadap negara-negara yang mengalami permasalahan hubungan bilateral. Jika permasalahan diantara kedua negara dianggap telah membaik, maka pada waktunya untuk melakukan normalisasi hubungan dan melanjutkan kerjasama antar kedua negara.

Turki ataupun Israel menyadari bahwa kedua negara sebenarnya saling membutuhkan. Hal ini juga dinyatakan oleh Presiden Erdogan, bahwa Israel membutuhkan Turki di kawasan Timur Tengah, dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Erdogan dalam naskah pidato tertulis disurat kabar Turki Kantor Berita AFP, seperti yang dilansir dari merdeka.com:

“Israel membutuhkan negara seperti Turki di kawasan, dan kami pun harus mengakui bahwa Bangsa Turki membutuhkan Israel. Inilah kenyataannya. Jika bisa dicapai langkah yang saling menguntungkan, maka normalisasi bilateral akan mengikuti secara alamiah” (Mohamad, 2016).

Sebelum tercapainya kata sepakat antar kedua negara untuk melakukan normalisasi hubungan bilateral, terdapat beberapa tahapan yang

dilalui kedua negara dalam upaya untuk tercapainya kata sepakat. Tahapan tersebut berupa adanya perjanjian antar kedua negara. Dari adanya kesadaran tersebut, maka ada sebuah keinginan untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Akan tetapi Presiden Erdogan mengatakan bahwa masih banyaknya hambatan dalam proses normalisasi hubungan bilateral, semenjak serangan militer Israel terhadap kapal Mavi Marmara.

Dengan adanya insiden tersebut, Presiden Erdogan mengajukan tiga keinginan yang diajukan kepada pihak Israel sebelum adanya normalisasi yaitu permintaan maaf Israel kepada korban serangan Mavi Marmara, kompensasi, dan pencabutan blokade di Gaza. Selain itu, dari pernyataan Presiden Erdogan, pengajuan syarat tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Energi Turki Berat Albayrak yang menyatakan bahwa adanya keharusan pemenuhan syarat yang diajukan oleh Turki kepada Israel. Berat Albayrak juga menyatakan tidak akan ada hubungan normal dengan Israel sebelum syarat-syarat dari Turki terpenuhi (Zulifan, 2015).

Adanya pertemuan-pertemuan lanjutan yang telah dilakukan antara Turki dengan Israel dalam hal upaya untuk normalisasi hubungan bilateral semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Pertemuan tersebut telah dilakukan di Swiss sebagai negara netral pada tahun 2013, antara Turki dan Israel untuk menemukan titik temu dalam persetujuan pemulihan hubungan. Pada akhirnya Israel menyetujui untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh Turki.

Pada tahun 2014, atas saran dari Presiden Obama, Turki dan Israel mencoba melakukan pertemuan. Akan tetapi pembicaraan tidak mencapai

kata sepakat. Namun pada sekitar akhir tahun 2015, Turki sudah menyiapkan untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Israel. Tepat pada tanggal 27 Juni 2016 kondisi politik di Timur Tengah mulai mereda, setelah adanya pengumuman mengenai normalisasi hubungan diplomatik antara Turki dengan Israel. Hal ini disambut baik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (KOMPAS, 2016).

2. Kesepakatan Pemulihan Hubungan

Pada akhirnya setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyepakati syarat yang diajukan oleh Turki untuk memulihkan hubungan. Netanyahu menyatakan bahwa pemulihan hubungan ini akan berdampak besar kepada Israel, karena hal ini merupakan kepentingan strategis bagi ekonomi Israel sendiri. Pada tanggal tersebut, masing-masing negara mengumumkan bahwa kedua negara telah melakukan normalisasi. Netanyahu mengumumkan pemulihan hubungan kedua negara di Roma, Italia, sementara Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengadakan konferensi pers serentak di Istana Cankaya, Ankara. Setelah pemulihan hubungan Erdogan mengutus Kemal Okem yang merupakan seorang diplomat senior Turki untuk mengisi posisi Duta Besar Turki untuk Israel, sedangkan Israel mengutus Eitan Naeh sebagai Duta Besar Israel untuk Turki (Hutapea, 2016).

Kemudian mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan normalisasi hubungan diplomatik antara Turki dengan Israel akan berdampak sangat baik bagi kawasan Timur Tengah, karena dapat memperbaiki kondisi geopolitik baik di kawasan tersebut. Pengamat independen hubungan Turki dan Israel, Senin Nasi menyatakan bahwa

normalisasi hubungan ini akan menguatkan peran Ankara sebagai perantara damai antara Palestina dan Israel. Sementara itu, Hamas juga menilai positif kesepakatan damai itu. Selanjutnya setelah adanya pertemuan, kedua negara selanjutnya membuat beberapa kesepakatan (Wijaya, 2016).

Berikut ini adalah beberapa hasil dari kesepakatan antara Turki dengan Israel, berdasarkan laporan dari surat kabar online Haaretz:

- 1) Turki akan mengeluarkan undang-undang dimana akan menjamin perlindungan dan menghindari semua tuntutan hukum terhadap militer Israel (*Israel Defence Forces*), dan ini membutuhkan janji dari Turki kepada Israel sebagai klaim kompensasi hukum di masa depan.
- 2) Memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara dengan mengirim kembali duta besar di masing-masing negara.
- 3) Israel akan membayarkan kompensasi berupa dana sekitar 20 Juta Dollar AS kepada seluruh korban dari penyerangan kapal Mavi Marmara.
- 4) Berdasarkan perjanjian ini, kompensasi dana hanya akan diberikan Israel setelah undang-undang yang ada dalam kesepakatan bagian 1 disetujui dan diterapkan. Jumlah kompensasi keluarga korban tersebut telah disepakati pada dua tahun yang lalu dan tidak berubah.
- 5) Turki mengalah pada soal tuntutannya kepada Israel dalam menghapus blokade laut di Jalur Gaza. Dilain sisi, Turki mengakui bahwa setiap bantuan kemanusiaan yang akan dikirim kepada

warga Gaza harus melalui proses pemeriksaan dari pihak Israel di Pelabuhan Ashdod.

- 6) Dalam hal pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Gaza, Israel hanya akan mengizinkan Turki untuk membangun rumah sakit, pembangkit listrik dan pabrik desalinasi (penyulingan air laut). Israel akan berjanji untuk mengizinkan Turki mengirim bantuan kemanusiaan tidak terbatas dan peralatan-peralatan ke Gaza selama itu melewati pelabuhan Ashdod.
- 7) Israel dan Turki akan menormalkan hubungan bilateral kedua negara. Tingkat perwakilan diplomatik akan dihidupkan kembali; duta besar akan ditunjuk untuk Tel Aviv dan Ankara, kemudian semua pembatasan kerjasama intelijen diplomatik, keamanan, maupun kerjasama militer pun akan dicabut.
- 8) Israel meminta maaf atas pembunuhan sembilan warga Turki dalam serangan oleh pasukan komando Angkatan Laut *Israel Defence Forces* (IDF) (HAARETZ, 2016).